Pajak dan Manajemen Keuangan
Volume. 3, Nomor.5 Oktober 2026
E-ISSN.: 3046-9848; P-ISSN.: 3046-899X; Hal. 70-88
DOI: https://doi.org/10.61132/pajamkeu.v3i5.2634
Tersedia: https://ejournal.areai.or.id/index.php/PAJAMKEU

Pengaruh Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia Periode 2018–2025

Gina Amelia
Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Kebangsaan Indonesia Bireuen, Indonesia.
**Penulis korespondensi: amelia43266@gmail.com*

Abstract. *This study aims to analyze the effect of inflation and the rupiah exchange rate on Value Added Tax (VAT) revenue in Indonesia during the 2018–2025 period, both partially and simultaneously. This study employs a quantitative approach using secondary time-series data in quarterly observations covering the period from 2018 to 2025. The data were obtained from Statistics Indonesia (BPS), Bank Indonesia (BI), and the Ministry of Finance/Directorate General of Taxes. A total of 32 observations were analyzed. The data analysis consisted of descriptive statistics, stationarity testing, classical assumption tests, multiple linear regression analysis, t-test, F-test, and coefficient of determination. The rupiah exchange rate and VAT revenue variables were transformed into natural logarithmic (Ln) forms. The results indicate that inflation has a positive and significant effect on VAT revenue, with a significance value of 0.024. The rupiah exchange rate also has a positive and significant effect on VAT revenue, with a significance value of 0.000. Simultaneously, inflation and the rupiah exchange rate significantly affect VAT revenue, as indicated by an F-statistic of 39.390 and a significance value of 0.000. The coefficient of determination is 0.731, indicating that 73.1% of the variation in VAT revenue can be explained by inflation and the rupiah exchange rate, while the remaining 26.9% is explained by other factors outside the research model.*

Keywords*: Inflation; Rupiah Exchange Rate; Tax Revenue; Taxation; Value Added Tax (VAT).*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia periode 2018–2025, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berbentuk data time series triwulanan selama periode 2018–2025. Data penelitian diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI), serta Kementerian Keuangan/Direktorat Jenderal Pajak. Jumlah data yang digunakan sebanyak 32 observasi. Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif, uji stasioneritas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Variabel nilai tukar rupiah dan penerimaan PPN ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural (Ln). Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN dengan nilai signifikansi 0,024. Nilai tukar rupiah juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN dengan nilai signifikansi 0,000. Secara simultan, inflasi dan nilai tukar rupiah berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN dengan nilai F sebesar 39,390 dan signifikansi 0,000. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,731 menunjukkan bahwa 73,1% variasi penerimaan PPN dapat dijelaskan oleh inflasi dan nilai tukar rupiah, sedangkan 26,9% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian.

Kata kunci: Inflasi; Keputusan Pajak; Nilai Tukar Rupiah; Penerimaan Pajak; Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

1. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan instrumen utama dalam sistem keuangan negara yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, peran pajak menjadi semakin strategis mengingat keterbatasan sumber penerimaan lain yang bersifat berkelanjutan. Pemerintah menempatkan pajak sebagai tulang punggung penerimaan negara, yang tercermin dari kontribusinya yang dominan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya (Mia Amalia, 2023).

Naskah Masuk: 21 Agustus 2026; Revisi: 29 September 2026; Diterima: 06 Oktober 2026; Terbit: 13 Oktober 2026

Struktur penerimaan pajak di Indonesia terdiri atas berbagai jenis pajak, salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean. Dengan karakteristik pemungutan pada setiap mata rantai produksi dan distribusi (*multi-stage tax*) melalui mekanisme kredit pajak, PPN memiliki basis pemajakan yang luas serta potensi penerimaan yang signifikan bagi negara (Rahma, 2021).

Sebagai pajak atas konsumsi, penerimaan PPN sangat dipengaruhi oleh tingkat aktivitas ekonomi masyarakat. Peningkatan konsumsi akan mendorong bertambahnya transaksi BKP dan JKP sehingga berdampak langsung terhadap peningkatan penerimaan PPN. Sebaliknya, perlambatan aktivitas ekonomi akan menurunkan volume transaksi kena pajak dan berimplikasi pada penurunan penerimaan PPN. Dengan demikian, kondisi ekonomi makro menjadi determinan penting dalam kinerja penerimaan PPN (Mispa, 2021).

Salah satu indikator makroekonomi yang berpengaruh terhadap konsumsi adalah inflasi. Inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan dalam suatu periode tertentu. Inflasi yang terkendali mencerminkan stabilitas ekonomi, sedangkan inflasi yang tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat serta memengaruhi pola konsumsi (Syafri, 2023).

Hubungan antara inflasi dan penerimaan PPN bersifat dinamis. Di satu sisi, kenaikan harga akibat inflasi dapat meningkatkan nilai nominal transaksi sehingga penerimaan PPN secara nominal turut meningkat. Namun, di sisi lain, inflasi yang tinggi berpotensi menekan konsumsi riil akibat menurunnya daya beli masyarakat, yang pada akhirnya dapat mengurangi basis pajak dalam jangka panjang (Nurhalizah, 2022).

Selain inflasi, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, khususnya dolar Amerika Serikat, merupakan variabel makroekonomi yang penting dalam perekonomian Indonesia. Nilai tukar mencerminkan kekuatan mata uang domestik dan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global, arus modal internasional, serta kebijakan moneter. Fluktuasi nilai tukar rupiah berdampak pada perubahan harga barang impor dan biaya produksi dalam negeri, yang selanjutnya memengaruhi tingkat konsumsi masyarakat dan transaksi BKP serta JKP sebagai dasar pemungutan PPN (Eka & Putri, 2019).

Periode 2018–2025 merupakan masa yang penuh dinamika bagi perekonomian Indonesia. Pada tahun 2020, perekonomian nasional mengalami kontraksi akibat pandemi COVID-19. Setelah itu, Indonesia memasuki fase pemulihan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya konsumsi dan produksi, meskipun tetap dihadapkan pada tekanan eksternal dan internal (Nasri, 2022).

2. KAJIAN TEORITIS

Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa. PPN mempunyai karakteristik sebagai pajak konsumsi karena pengenaannya berkaitan dengan transaksi barang dan jasa. Oleh karena itu, perkembangan aktivitas konsumsi masyarakat dapat menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan penerimaan PPN (Subagyo, 2020).

Semakin tinggi aktivitas transaksi barang dan jasa yang menjadi objek PPN, semakin besar pula potensi penerimaan PPN. Sebaliknya, apabila aktivitas ekonomi mengalami perlambatan, transaksi barang dan jasa dapat menurun sehingga penerimaan PPN juga dapat mengalami penurunan (Indrawati, 2023).

Inflasi

Inflasi merupakan kondisi meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Inflasi dapat disebabkan oleh peningkatan permintaan agregat, kenaikan biaya produksi, perubahan jumlah uang beredar, perubahan nilai tukar, ekspektasi inflasi, serta kebijakan pemerintah (Budiman, 2022).

Dalam penelitian ini, inflasi digunakan sebagai variabel independen pertama. Inflasi dapat memengaruhi penerimaan PPN melalui perubahan harga barang dan jasa. Ketika harga barang dan jasa mengalami peningkatan, nilai nominal transaksi juga dapat meningkat. Karena PPN berkaitan dengan nilai transaksi konsumsi, peningkatan harga dapat meningkatkan penerimaan PPN secara nominal apabila volume transaksi tetap terjaga (Bruto, 2024).

Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar rupiah merupakan nilai rupiah yang dinyatakan terhadap mata uang asing, khususnya dolar Amerika Serikat. Perubahan nilai tukar dapat memengaruhi kegiatan ekonomi melalui harga barang impor, biaya produksi, perdagangan internasional, dan konsumsi (Retnawati, 2022).

Depresiasi rupiah menyebabkan harga barang yang berasal dari luar negeri menjadi relatif lebih mahal dalam rupiah. Kondisi tersebut dapat meningkatkan nilai transaksi dalam rupiah pada kegiatan impor. Karena PPN juga dikenakan pada kegiatan konsumsi dan impor tertentu, perubahan nilai tukar dapat berkaitan dengan penerimaan PPN (Nasri ,2022).

Dengan demikian, nilai tukar rupiah dapat menjadi salah satu indikator makroekonomi yang berkaitan dengan penerimaan PPN. Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa nilai tukar dapat mempunyai pengaruh terhadap penerimaan PPN, meskipun hasilnya berbeda pada beberapa objek dan periode penelitian (Syahrull Hidayah, 2023).

Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai inflasi, nilai tukar rupiah, dan penerimaan PPN telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Imilda dan Prasetya meneliti pengaruh inflasi, suku bunga, dan nilai tukar rupiah terhadap penerimaan PPN pada KPP Pratama Serpong periode 2015–2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi dan nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Pane dan Avelina meneliti pengaruh tingkat inflasi dan nilai tukar terhadap penerimaan PPN pada KPP Pratama Medan Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN impor, sedangkan nilai tukar rupiah berpengaruh signifikan. Secara bersama-sama, inflasi dan nilai tukar berpengaruh terhadap penerimaan PPN impor. Amelia dan Kunawangsih meneliti pengaruh inflasi, nilai tukar rupiah, dan Produk Domestik Bruto terhadap penerimaan PPN di Indonesia periode 2005–2020. Penelitian tersebut menggunakan regresi linear berganda dan menunjukkan bahwa variabel makroekonomi yang digunakan memiliki hubungan yang berbeda terhadap penerimaan PPN. Ashifa dan Yulyanah melakukan penelitian mengenai pengaruh inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap penerimaan PPN pada KPP Pratama Serpong periode 2019–2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan secara parsial, sedangkan nilai tukar rupiah tidak berpengaruh secara parsial. Secara simultan, inflasi dan nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

Perbedaan hasil tersebut menjadi salah satu dasar penelitian ini untuk menguji kembali pengaruh inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap penerimaan PPN, tetapi menggunakan data nasional Indonesia dengan periode triwulanan 2018–2025.

Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang diajukan peneliti sebagai jawaban awal atas rumusan masalah penelitian yang kebenarannya masih harus diuji melalui analisis data. Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H_{o1}: Inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN di Indonesia.

H_{a1}: Inflasi berpengaruh terhadap penerimaan PPN di Indonesia.

H_{o2}: Nilai tukar Rupiah tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN di Indonesia.

H_{a2}: Nilai tukar Rupiah berpengaruh terhadap penerimaan PPN di Indonesia.

H_{03}: Inflasi dan nilai tukar Rupiah secara simultan tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN di Indonesia.

H_{a3}: Inflasi dan nilai tukar Rupiah secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan PPN di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori. Penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri atas inflasi (X1) dan nilai tukar rupiah (X2), sedangkan variabel dependen adalah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y).

Data yang digunakan merupakan data sekunder berbentuk time series triwulanan selama periode 2018–2025. Periode tersebut terdiri atas delapan tahun dengan empat triwulan setiap tahun sehingga diperoleh 32 observasi. Data inflasi diperoleh dari Badan Pusat Statistik, data nilai tukar rupiah diperoleh dari Bank Indonesia, sedangkan data penerimaan PPN diperoleh dari Kementerian Keuangan/Direktorat Jenderal Pajak. Data kemudian diolah menggunakan Microsoft Excel, EViews 12, dan SPSS.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data sekunder dari sumber resmi yang berkaitan dengan variabel penelitian. Karena penelitian menggunakan data sekunder berbentuk time series, penelitian tidak menggunakan kuesioner maupun instrumen survei.

Sebelum analisis regresi dilakukan, data diuji menggunakan uji stasioneritas Augmented Dickey-Fuller (ADF). Uji ini dilakukan untuk memastikan bahwa data time series yang digunakan tidak menghasilkan hubungan regresi yang bersifat semu. Hasil uji ADF menunjukkan bahwa inflasi stasioner pada tingkat level, sedangkan Ln nilai tukar rupiah dan Ln penerimaan PPN menjadi stasioner setelah first difference.

Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri atas uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Variabel nilai tukar rupiah dan penerimaan PPN ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural untuk mengurangi fluktuasi data dan memperoleh model estimasi yang lebih baik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pengujian Stasioneritas (Unit Root Test)

Langkah awal sebelum melakukan uji kausalitas granger pada data sekunder yaitu pengujian stasioneritas dengan menggunakan Uji Augmented Dickey-Fuller (ADF). Data stasioner dapat dilihat dari hasil estimasi dengan memperhatikan nilai probabilitas yang ada pada setiap variabel. Data dikatakan lolos uji ADF apabila nilai probabilitas setiap variable kurang dari 0,5%, jika pada tingkat level (0) nilai probabilitas lebih dari 5% maka data tidak lolos sehingga perlu dilakukukan kembali uji ADF pada level 1 *(first difference)* atau level 2 *(second difference).*

Tabel 1. Hasil Uji Stasioneritas

Variabel	Tingkat	t-Statistik	Probabilitas	Keterangan
Inflasi	Level	-2,818	0,0556	Stasioner
Ln Nilai Tukar Rupiah	Level	-1,954	0,3021	Tidak Stasioner
	1st Difference	-8,764	0,0000	Stasioner
Ln Penerimaan PPN	Level	-1,671	0,4418	Tidak Stasioner
	1st Difference	-6,283	0,0000	Stasioner

Sumber: Lampiran Output EViews (Data Diolah, 2026)

Berdasarkan hasil uji stasioneritas pada tabel di atas, variabel inflasi sudah stasioner pada tingkat level. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai probabilitas sebesar 0.0556 yang lebih kecil dari 0,5 sehingga variabel inflasi tidak perlu diuji kembali pada tingkat berikutnya. Sementara itu, variabel Ln nilai tukar rupiah dan Ln penerimaan PPN belum stasioner pada tingkat level karena nilai probabilitas masing-masing sebesar 0.3021 dan 0.4418 atau lebih besar dari 0,5. Oleh karena itu, kedua variabel tersebut diuji kembali pada tingkat *first difference.*

Hasil pengujian pada tingkat *first difference* menunjukkan bahwa variabel Ln nilai tukar rupiah memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0000 dan variabel Ln penerimaan PPN sebesar 0.0000. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,5 sehingga kedua variabel dinyatakan telah stasioner pada tingkat *first difference*. Dengan demikian, seluruh variabel penelitian telah memenuhi asumsi stasioneritas sehingga layak untuk digunakan pada analisis selanjutnya.

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data penelitian. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan aplikasi **SPSS** terhadap 32 data triwulanan selama periode 2018–2025. Dalam penelitian ini, variabel nilai tukar rupiah dan penerimaan PPN terlebih dahulu ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma

natural *(Ln)* untuk mengurangi tingkat fluktuasi data serta memperoleh hasil analisis yang lebih baik.

Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif Statistics

		Inflasi	Ln Nilai Tukar Rupiah	Ln Penerimaan PPN
N	Valid	32	32	32
	Missing	0	0	0
Mean		2,8327	9,6177	5,0339
Std. Deviation		1,10821	0,05873	0,29280
Skewness		0,945	0,412	-0,186
Std. Error of Skewness		0,414	0,414	0,414
Kurtosis		0,327	-0,814	-0,921
Std. Error of Kurtosis		0,809	0,809	0,809
Minimum		1,33	9,5292	4,4965
Maximum		5,95	9,7405	5,5326
Sum		90,65	307,77	161,08

Sumber: Lampiran Output SPSS (Data Diolah, 2026)

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pada tabel di atas, maka dapat kita jelaskan bahwa variabel inflasi (X1) memiliki nilai rata-rata *(mean)* sebesar 2,8327 dengan nilai standar deviasinya adalah sebesar 1,10821. Nilai minimum inflasi tercatat sebesar 1,33 dan nilai maksimum sebesar 5,95. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat inflasi selama periode penelitian mengalami perubahan yang cukup beragam akibat pengaruh kondisi ekonomi domestik maupun global. Variabel Ln nilai tukar rupiah (X2) memiliki nilai rata-rata *(mean)* sebesar 9.6177 dengan standar deviasinya adalah sebesar 0.05873. Nilai minimum sebesar 9.5292 dan nilai maksimum sebesar 9.7405 menunjukkan bahwa pergerakan nilai tukar rupiah relatif stabil walaupun tetap mengalami fluktuasi selama periode penelitian.

Hasil Uji Asumsi Klasik

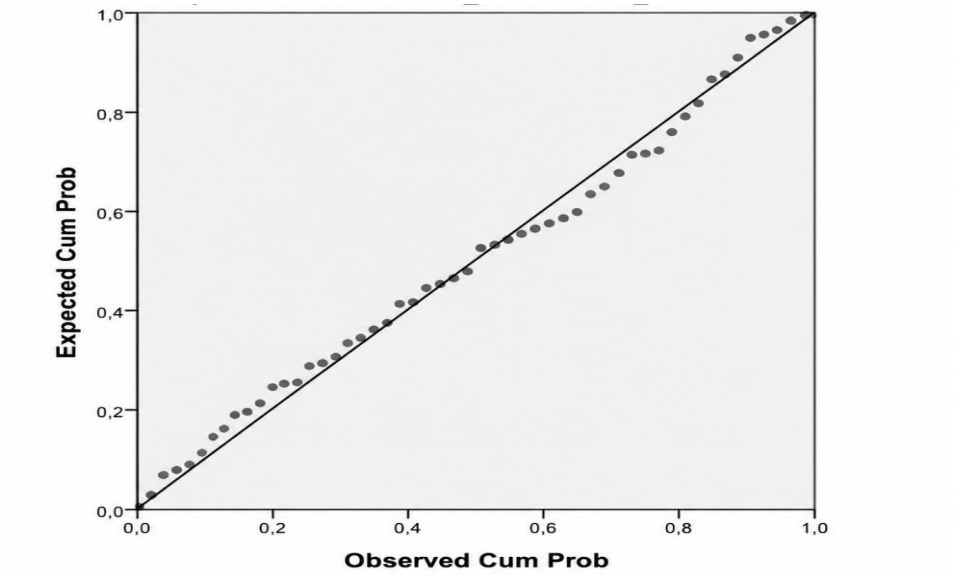
Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia periode 2018–2025. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji t secara parsial dan uji f secara simultan. Sebelum dilakukan analisis regresi, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan telah memenuhi syarat statistik dan terbebas dari berbagai penyimpangan.

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data residual pada model regresi memiliki distribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas juga bertujuan untuk melihat apakah model regresi yang digunakan dalam penelitian telah memenuhi asumsi normalitas. Model regresi yang baik adalah model yang memiliki distribusi data residual normal atau mendekati normal.

Normal P-P Plot Of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Ln_ Penerimaan_PPN



Gambar 1. Uji Normalitas

Sumber: Lampiran Output SPSS (Data Diolah, 2026)

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan grafik normal Plot, dapat diketahui bahwa titik-titik residual menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Hal tersebut menunjukkan bahwa data residual dalam model regresi telah berdistribusi normal. Dengan demikian, model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas sehingga layak digunakan untuk pengujian selanjutnya.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat hubungan atau korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak menunjukkan adanya korelasi yang tinggi di antara variabel bebas. Pengujian multikolinearitas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai *tolerance value* dan *variance inflation factor* (VIF) menggunakan bantuan aplikasi SPSS for Windows.

Pada penelitian ini, variabel nilai tukar rupiah terlebih dahulu ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural *(Ln)* untuk mengurangi tingkat fluktuasi data dan menghasilkan model regresi yang lebih baik. Suatu model regresi dinyatakan tidak mengalami multikolinearitas apabila nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,10. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients[a]

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Inflasi	0,812	1,232
Ln Nilai Tukar Rupiah	0,812	1,232

a. Dependent Variable: Penerimaan PPN

Sumber: Lampiran Output SPSS (Data diolah, 2026)

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.2, diketahui bahwa variabel inflasi dan Ln nilai tukar rupiah memiliki nilai VIF sebesar 1.232 atau lebih kecil dari 10. Selain itu, nilai tolerance yang diperoleh sebesar 0.812 atau lebih besar dari 0,10. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami gejala multikolinearitas antar variabel independen. Dengan demikian, persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak untuk digunakan pada pengujian selanjutnya.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat hubungan antara kesalahan pengganggu pada periode sekarang dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Model regresi yang baik seharusnya tidak mengalami autokorelasi. Dalam penelitian ini, pengujian autokorelasi dilakukan menggunakan metode Durbin-Watson (DW Test) dengan bantuan aplikasi SPSS for Windows. Pada penelitian ini, variabel nilai tukar rupiah dan penerimaan PPN terlebih dahulu ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural *(Ln)* untuk mengurangi fluktuasi data dan menghasilkan model regresi yang lebih baik. Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,855	0,731	0,15742	1,921

a. Predictors: (Constant), Inflasi, Nilai Tukar Rupiah

b. Dependent Variable: Penerimaan PPN

Sumber: Lampiran Output SPSS (Data diolah, 2026)

Dari tabel 4. diperoleh nilai *Durbin-Watson* sebesar 1.921. Nilai tersebut kemudian dibandingkan dengan nilai tabel yang menggunakan 5% (0,05) dengan jumlah sampel sebanyak 32 (N) data dan jumlah variabel independen sebanyak 2 (K=2), maka akan diperoleh nilai DU sebesar 1,5770 dalam tabel *Durbin-Watson.* Angka-angka yang sudah ada dimasukkan kedalam rumus pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi yaitu: DU <

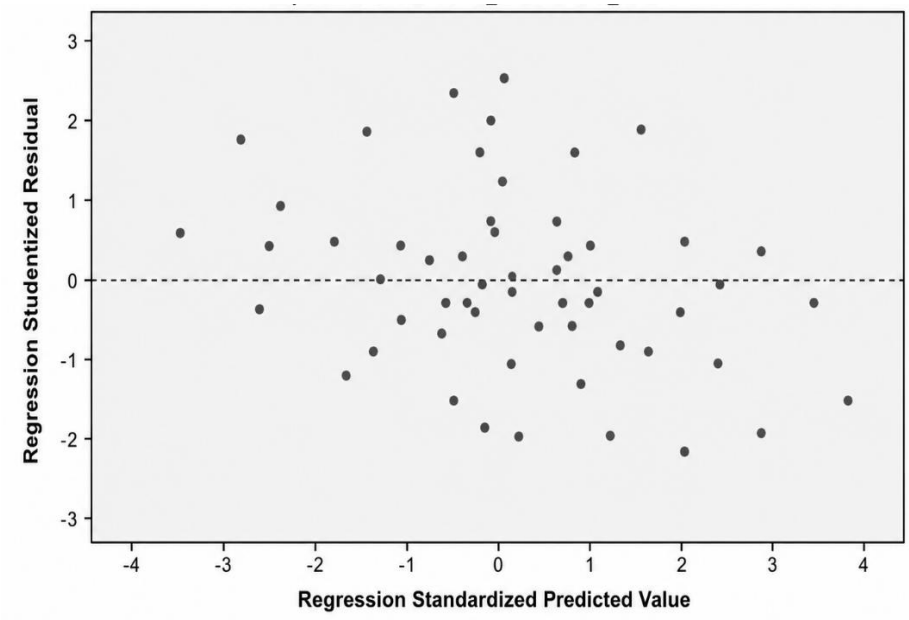
DW < 2 – DU,JADI 1,5770 < 1,921 < 2,4230. Dari rumus tersebut dapat dilihat bahwa DU < DW sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi antar variabel independen,sehingga model regresi layak digunakan.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah model yang tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Pada penelitian ini, pengujian heteroskedastisitas dilakukan menggunakan grafik *scatterplot* dengan bantuan aplikasi SPSS for Windows.

Scatterplot

Dependent Variable:Ln_Penerimaan_PPN



Gambar 2. Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Lampiran Output SPSS (Data Diolah, 2026)

Berdasarkan hasil grafik *scatterplot* pada penelitian ini, terlihat bahwa titik-titik residual menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu yang jelas. Penyebaran titik juga berada di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal tersebut menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan untuk menganalisis pengaruh inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap penerimaan PPN tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Dengan demikian, model regresi dalam penelitian ini dinyatakan layak untuk digunakan pada pengujian selanjutnya.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap variabel dependen yaitu penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia periode 2018–2025. Dalam penelitian ini, variabel nilai tukar rupiah dan penerimaan PPN terlebih dahulu ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural *(Ln)* untuk mengurangi fluktuasi data dan menghasilkan model regresi yang lebih baik. Pengolahan data dilakukan menggunakan aplikasi SPSS for Windows. Berikut merupakan hasil analisis regresi linear berganda yang diperoleh dari output SPSS.

Tabel 5. Hasil Regresi Linear Berganda Coefficients[a]

Model	Unstand ardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
						Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.		
1 (Constant)	-7,842	1,861		-4,215	0,000		
Inflasi	0,041	0,017	0,268	2,387	0,024	0,812	1,232
Ln Nilai TukarRupiah	1,281	0,190	0,756	6,742	0,000	0,812	1,232

a. Dependent Variable: Penerimaan PPN

Sumber: Lampiran Output SPSS (Data diolah, 2026)

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda pada tabel 5. di atas, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\mathbf{LnPPN = -7.842 + 0.041\ X_1 + 1.281\ LnX_2 + e}$$

Berdasarkan persamaan regresi linear berganda yang telah diperoleh, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta pada persamaan regresi sebesar -7,842. Hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel inflasi dan nilai tukar rupiah dianggap konstan atau bernilai tetap, maka nilai penerimaan PPN sebesar -7,842.
2. Variabel inflasi (X_1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,024 yang berarti lebih kecil dari 0,05 dengan koefisien regresi sebesar 0,041. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN di Indonesia. Artinya, apabila inflasi mengalami peningkatan, maka penerimaan PPN juga cenderung meningkat.
3. Variabel nilai tukar rupiah (X_2) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05 dengan koefisien regresi sebesar 1.281. Hal ini menunjukkan bahwa variabel nilai tukar rupiah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN di

Indonesia. Dengan demikian, peningkatan nilai tukar rupiah akan diikuti oleh peningkatan penerimaan PPN.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis pada penelitian ini terdiri dari uji signifikan pasrial (uji statistik-t) dan uji hipotesis secara simultan (uji-F). Berikut merupakan hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini.

Uji Statistik (Uji-t)

Pada penelitian ini, variabel nilai tukar rupiah dan penerimaan PPN terlebih dahulu ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural *(Ln)* untuk mengurangi fluktuasi data dan memperoleh hasil estimasi yang lebih baik Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui secara parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini untuk menguji pengaruh variabel inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap penerimaan PPN baik secara parsial dengan memebandingkan nilai t-tabel dan t-hitung dan menganalisis penguji secara signifikan. Jika nilai signifikan < 0,05 maka variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Berikut merupakan hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini.

Tabel 6. Hasil Uji Parsial (Uji-t) Coefficients[a]

Model		Standardized Coefficients		
		Beta	T	Sig.
1	(Constant)	-	-4,215	0,000
	Inflasi	0,268	2,387	0,024
	Ln Nilai Tukar Rupiah	0,756	6,742	0,000

a. Dependent Variable: Penerimaan PPN

Sumber: Lampiran Output SPSS (Data diolah, 2026)

Berdasarkan hasil pengujian statistik t pada tabel 6. maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel Inflasi (X_1) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2,387 dan t_{tabel} sebesar 1,699, sehingga diperoleh $t_{hitung} > t_{tabel}$ (2,387 > 1,699). Nilai signifikansi sebesar 0,024 < 0,05 dengan koefisien regresi sebesar 0,041. Dengan demikian, H_1 diterima, yang berarti bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ln Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Variabel Nilai Tukar Rupiah (X_2) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 6,742 dan t_{tabel} sebesar 1,699, sehingga diperoleh $t_{hitung} > t_{tabel}$ (6,742 > 1,699). Nilai signifikansi sebesar

0,000 < 0,05 dengan koefisien regresi sebesar 1,281. Dengan demikian, H_2 diterima, yang berarti bahwa Nilai Tukar Rupiah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Uji Simultan (Uji F)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. Kriteria dalam pengambilan keputusan pada uji F / Simultan ini adalah jika nilai signifikan < 0,05 maka variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikan > 0,05 maka variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Berikut disajikan uji F statistik dalam penelitian ini pada tabel 7:

Tabel 7. Uji Simultan dengan Uji F ANOVA[b]

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1,953	2	0,977	39,390	0,000
Residual	0,719	29	0,025		
Total	2,672	31			

a. Predictors: (Constant), Inflasi,_Nilai_Tukar_Rupiah

b. Dependent Variable: Penerimaan_PPN

Sumber: Lampiran SPSS (Data Diolah, 2026)

Berdasarkan hasil analisis dari tabel 7. diketahui bahwa nilai $F\text{-}^{hitung}$ sebesar 39,390 > $F\text{-}^{tabel}$ sebesar 3,33 dengan angka signifikansi sebesar 0,000. Maka dapat disimpulkan bahwa angka signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Artinya bahwa variabel Inflasi (X_1) dan Nilai Tukar Rupiah (X_2) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Y) di Indonesia periode 2018–2025.

Analisis Korelasi (Hubungan) dan Koefisien Determinasi

Analisis Korelasi (Hubungan)

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui kuat lemahnya hubungan antara Iflasi (X1), Nilai Tukar Rupiah (X2) terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y). Untuk mengetahui koefisien korelasi dapat kita lihat table berikut ini:

Tabel 8. Hasil Analisis Koefisien Korelasi

Model summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,855	0,731	0,712	0,15742

a. Predictors: (Constant), Inflasi, Nilai Tukar Rupiah

b. Dependent Variable: Penerimaan PPN

Sumber: Lampiran Output SPSS (Data Diolah, 2026)

Berdasarkan table 8. mengenai hasil uji koreiasi, maka dapat dijelaskan bahwa korelasi (hubungan) antara Inflasi (X_1), Nilai Tukar Rupiah (X_2) terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y) adalah sebesar 0,855 dengan arah yang positif. Nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,855 menunjukkan bahwa hubungan antara variabel Inflasi (X_1) dan Nilai Tukar Rupiah (X_2) secara bersama-sama terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Y) termasuk dalam kategori sangat kuat dan memiliki arah hubungan yang positif.

Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) merupakan pengujian yang bertujuan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel Inflasi (X_1) dan Nilai Tukar Rupiah (X_2) dalam menjelaskan variasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Y). Berdasarkan Tabel 4.7 dapat dijelaskan bahwa nilai koefisien determinasi **(**R Square) pada model penelitian ini adalah sebesar 73,1%. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 73,1% variasi perubahan Penerimaan PPN (Y) dapat dijelaskan oleh variabel Inflasi (X_1) dan Nilai Tukar Rupiah (X_2). Sedangkan sisanya sebesar 26,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel yang diteliti dalam penelitian ini.

Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dianalisis secara statistik dengan metode analisis regresi linear berganda mengenai pengaruh Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berikut ini akan dibahas pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen:

Pengaruh Inflasi terhadap Ln Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil output SPSS menunjukkan bahwa inflasi terhadap Ln Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diperoleh nilai t-hitung sebesar 2,387 dan $t\text{-}_{tabel}$ sebesar 1,699, sehingga diperoleh $t\text{-}_{hitung} > t\text{-}_{tabel}$ (2,387 > 1,699). Inflasi menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,024 yang berarti lebih kecil dari 0,05 dengan

koefisien regresi sebesar 0,041. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ln Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Inflasi menunjukkan suatu kondisi terjadinya kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berlangsung secara terus-menerus dalam suatu periode tertentu. Kenaikan tingkat inflasi menyebabkan meningkatnya harga barang dan jasa yang menjadi objek pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Peningkatan harga tersebut mengakibatkan bertambahnya nilai transaksi yang dikenakan pajak sehingga penerimaan PPN yang diperoleh pemerintah juga mengalami peningkatan (Winarti, 2020).

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Indrawati, (2023) yang menyatakan bahwa inflasi dapat memengaruhi penerimaan pajak melalui perubahan tingkat harga barang dan jasa yang menjadi objek pajak. Selain itu, Maulana, M. A., (2022) menjelaskan bahwa kenaikan tingkat harga secara umum akan meningkatkan nilai transaksi ekonomi, sehingga berpotensi meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pengaruh Ln Nilai Tukar Rupiah terhadap Ln Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil output SPSS menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diperoleh nilai $t\text{-}_{hitung}$ sebesar 6,742 dan $t\text{-}_{tabel}$ sebesar 1,699, sehingga diperoleh $t\text{-}_{hitung} > t\text{-}_{tabel}$ (6,742 > 1,699). Ln nilai tukar rupiah menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05 dengan koefisien regresi sebesar 1,281. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel nilai tukar rupiah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Nilai tukar rupiah merupakan harga mata uang domestik terhadap mata uang asing, khususnya dolar Amerika Serikat. Perubahan nilai tukar dapat memengaruhi aktivitas perdagangan internasional, terutama impor barang dan jasa. Ketika nilai tukar rupiah mengalami pelemahan, harga barang impor akan meningkat sehingga nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor juga cenderung meningkat Syafrizal (2023).

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Mia Amalia, (2025) yang menyatakan bahwa perubahan nilai tukar memengaruhi kegiatan perdagangan internasional dan nilai impor suatu negara. Selain itu, Budiman, (2024) menjelaskan bahwa fluktuasi nilai tukar dapat memengaruhi harga barang impor dan aktivitas ekonomi yang pada akhirnya berdampak pada penerimaan pajak, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pengaruh Inflasi dan Ln Nilai Tukar Rupiah terhadap Ln Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil output SPSS menunjukkan bahwa inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) didapatkan nilai hipotesis secara simultan dengan angka $F\text{-}_{hitung} > F\text{-}_{tabel}$, dimana 39,390 > 3,33. Inflasi dan nilai tukar rupiah menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti bahwa nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel inflasi dan nilai tukar rupiah secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi makro memiliki keterkaitan dengan penerimaan pajak negara. Inflasi memengaruhi tingkat harga barang dan jasa yang menjadi objek PPN, sedangkan nilai tukar rupiah memengaruhi aktivitas perdagangan internasional yang berdampak pada penerimaan PPN, khususnya dari sektor impor.

Selain itu, berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai R Square sebesar 0,731 atau 73,1%, yang menunjukkan bahwa ariasi perubahan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat dijelaskan oleh variabel Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah, sedangkan sisanya sebesar 26,9% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Ashifa, A. P, (2025) yang menyatakan bahwa variabel makroekonomi seperti inflasi dan nilai tukar memiliki hubungan yang erat dengan aktivitas ekonomi dan penerimaan negara. Selain itu, Eka, (2019) menjelaskan bahwa stabilitas ekonomi makro berperan penting dalam menjaga tingkat konsumsi dan aktivitas perdagangan yang menjadi dasar pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang telah dilakukan maka diperoleh kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini dibuktikan dengan hasil uji parsial (uji t) yang menunjukkan nilai $t\text{-}_{hitung}$ sebesar 2,387 lebih besar dari $t\text{-}_{tabel}$ sebesar 1,699 (2,387 > 1,699), serta nilai signifikansi sebesar 0,024 lebih kecil dari taraf signifikansi ($\alpha = 0,05$) (0,024 < 0,05). Koefisien regresi sebesar 0,041 menunjukkan bahwa setiap kenaikan inflasi sebesar 1% akan

meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 0,041, dengan asumsi variabel lain tetap. Dengan demikian, H_{a1} diterima.

2. Nilai Tukar Rupiah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini dibuktikan dengan hasil uji parsial (uji t) yang menunjukkan nilai $t\text{-}_{hitung}$ sebesar 6,742 lebih besar dari $t\text{-}_{tabel}$ sebesar 1,699 (6,742 > 1,699), serta nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi ($\alpha = 0,05$) (0,000 < 0,05). Koefisien regresi sebesar 1,281 menunjukkan bahwa setiap kenaikan Nilai Tukar Rupiah sebesar 1 satuan akan meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1,281, dengan asumsi variabel lain tetap. Dengan demikian, H_{a2} diterima.

3. Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini dibuktikan dengan hasil uji simultan (uji F) yang menunjukkan nilai $F\text{-}_{hitung}$ sebesar 39,390 lebih besar dari $F\text{-}_{tabel}$ sebesar 3,33 (39,390 > 3,33), serta nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi ($\alpha = 0,05$) (0,000 < 0,05). Dengan demikian, H_{a3} diterima. Selain itu, hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai R *Square* sebesar 0,731, yang berarti bahwa sebesar 73,1% variasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat dijelaskan oleh variabel inflasi dan Nilai Tukar Rupiah, sedangkan sisanya sebesar 26,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi Pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak, diharapkan dapat memperhatikan perkembangan inflasi dan nilai tukar rupiah dalam merumuskan kebijakan fiskal dan perpajakan. Stabilitas kedua indikator ekonomi makro tersebut dapat mendukung optimalisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menyusun strategi peningkatan Penerimaan PPN, terutama melalui pengawasan terhadap sektor-sektor yang sensitif terhadap perubahan inflasi dan Nilai Tukar Rupiah.

3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperpanjang periode penelitian serta menambahkan variabel independen lain yang diduga memengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), seperti pertumbuhan ekonomi, konsumsi rumah tangga, jumlah

Pengusaha Kena Pajak (PKP), nilai impor, suku bunga, kebijakan tarif PPN, maupun variabel makroekonomi lainnya sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif.

DAFTAR REFERENSI

Arsyad, M. (2023). Analisis dampak inflasi terhadap nilai tukar rupiah. Jurnal Mirai Management, 8(1), 355–366. https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/mirai/article/view/3807

Ashifa, A. P. (2025). Pengaruh inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap penerimaan PPN pada KPP Pratama Serpong tahun 2019–2023, 1(3), 215–224.

Bruto, D., & Penerimaan, T. (2024). Pengaruh nilai tukar rupiah, inflasi, dan produk domestik bruto terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) di Kota Makassar tahun 2020–2022.

Budiman. (2024). Analisis pengaruh inflasi dan nilai tukar terhadap rumah tangga terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) di Indonesia.

Eka, S., & Medan, P. (2019). Pengaruh inflasi, nilai tukar rupiah dan jumlah pengusaha kena pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. STIE Eka Prasetya Medan.

Ghozali. (2023). Konsep uji asumsi klasik pada regresi linier berganda. 2(2), 102–110.

Gujarati. (2019). Dasar-dasar ekonometrika (Edisi ke-5). Salemba Empat.

Indrawati. (2023). Pengaruh inflasi dan jumlah pengusaha kena pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN). Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, 5(1), 285–302. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i1.1203

Maulana, M. A. (2022). Pengaruh nilai tukar rupiah, inflasi dan jumlah pengusaha kena pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN).

Amalia, M. (2025). Pengaruh inflasi, nilai tukar rupiah dan jumlah pengusaha kena pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Jurnal Maneksi (Management Ekonomi dan Akuntansi), 14(3), 1221–1232.

Mispa, S. (2021). Pengaruh pajak penjualan atas barang mewah dan nilai tukar rupiah terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat. Economics and Digital Business Review, 2(1), 87–102. https://doi.org/10.37531/ecotal.v2i2.26

Mankiw, N. G. (2020). Pengantar ekonomi makro. Salemba Empat.

Nasri, M. (2022). Pengaruh inflasi, nilai tukar rupiah dan jumlah pengusaha kena pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai, 311–321.

Nurhalizah. (2025). Pengaruh inflasi dan nilai ekspor terhadap PPN dan PPNBM di Indonesia tahun 2015–2024. 7, 247–263. https://doi.org/10.47491/landjournal.v7i1.4600

Porter, G. (2020). Analisis inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap penerimaan PPN tahun 2017–2021. 3(2), 73–82. https://doi.org/10.30812/varian.v3i2.627

Qurnia. (2017). Pengaruh inflasi, nilai tukar rupiah dan jumlah pengusaha kena pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Unnes Journal of Mathematics, 6(2), 168–177.

Rahma. (2021). Analisis pengaruh inflasi, nilai tukar rupiah dan jumlah pengusaha kena pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai, 22–51.

Salim, A. (2023). Pengaruh inflasi, pengusaha kena pajak dan nilai tukar rupiah terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) di Kota Makassar.

Sari. (2021). Pengaruh inflasi, nilai tukar rupiah dan jumlah pengusaha kena pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

Sari, R. D. P., & Giovanni, A. (2021). Analisis kinerja keuangan bank umum syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen: Jurnal Ilmiah Multi Science, 12(2), 71–85. https://doi.org/10.52657/jiem.v12i2.1589

Sapridawati, Y. (2021). Pengaruh inflasi, nilai tukar rupiah dan jumlah pengusaha kena pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Jurnal Kolaboratif Sains, 4(10), 520–526.

Sapridawati, Y., Indrawati, N., & Sofyan, A. (2021). Pengaruh inflasi terhadap nilai tukar rupiah, 2(1), 75–93.

Sholihin, A. (2022). Pengaruh inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga, dan jumlah pengusaha kena pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai, 1–12.

Subagyo. (2020). Pengaruh inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/mirai/article/view/3807

Sugiyono. (2025). Implementasi good environmental governance dalam pengelolaan sampah di Kota Depok tahun 2023. 11(3), 978–997. https://doi.org/10.25157/moderat.v11i3.4834

Sukirno, S. (2019). Makroekonomi teori pengantar. PT RajaGrafindo Persada.

Syafri. (2023). Analisis nilai tukar rupiah dan inflasi terhadap penerimaan PPN. 9(3), 97–113.

Syahrullah. (2025). Pengaruh inflasi, kurs, dan industri terhadap penerimaan pajak di Indonesia. 10(2), 362–371. https://doi.org/10.52447/map.v10i2.8953

T., & Sriwijaya. (2021). Pengaruh tingkat inflasi dan perkembangan nilai tukar rupiah terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai di Sumatera Selatan.

Purwanti, T. (2024). Inflasi terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN). https://journal.php/mirai/article/view/3807

Wahyu, M. S. (2024). The effect of inflation and the rupiah exchange rate on VAT (value added tax) revenue in 2019–2023 (case study at Majene Primary Tax Service Office).

Wijayanti, W. (2018). Analisis dampak kenaikan tarif pajak pertambahan nilai hasil produksi. Universitas Brawijaya. http://repository.ub.ac.id/id/eprint/165450/1/Wiwit

Winarti, W. (2017). Bab II kajian pustaka, kerangka pemikiran dan hipotesis 2.1, 11–26.

Yusuf, M. (2022). Analisis pengaruh inflasi terhadap penerimaan PPN, 11–24